

IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI

Mujib Abdullah Romdon¹, Berliana², Dian Andriawan³
¹mujib@unlp.ac.id, ²berliana@unlp.ac.id, ³dian@unlp.ac.id
^{1,2,3} Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh implementasi penguatan kebijakan moderasi beragama yang dilakukan Kementerian Agama RI, khususnya terkait dengan pendidikan tinggi. Saat ini, perbedaan agama dan kepercayaan merupakan penyebab utama perselisihan sosial di masyarakat. Penting bagi organisasi-organisasi pemerintah untuk mengembangkan program-program inovatif untuk mengatasi situasi dan kondisi ini. Program moderasi beragama yang dimulai Kementerian Agama RI pada tahun 2016 merupakan salah satu inisiatif yang sudah dipraktikkan. Metode penelitian adalah studi literatur yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Oleh karena itu, besar kemungkinan keberagaman tersebut akan menimbulkan konflik antar berbagai suku, budaya, bahkan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan yang efektif dalam membina kerukunan antar umat beragama adalah dengan mengarusutamakan moderasi beragama. Kebijakan pendidikan moderasi beragama bertujuan untuk mencegah intoleransi, fanatisme agama, dan ekstremisme yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional, serta mendorong kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Penguatan pendidikan moderasi beragama dalam pembelajaran efektif, dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, seperti diskusi kelompok, angket atau survei, penilaian dan ujian, serta observasi langsung. Pendidikan moderasi beragama dapat membantu peserta didik dalam memahami tempat agama dalam masyarakat kontemporer dan dalam menumbuhkan cita-cita keagamaan yang konstruktif dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi.

Kata-kata kunci: moderasi beragama, perguruan tinggi, penguatan pendidikan

IMPLEMENTATION OF STRENGTHENING RELIGIOUS MODERATION EDUCATION IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT

Abstract: The purpose of this study is to find out more about the implementation of strengthening religious moderation policies carried out by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, especially in relation to higher education. Today, differences in religion and belief are a major cause of social strife in society. It is important for government organizations to develop innovative programs to address these situations and conditions. The religious moderation program started by the Ministry of Religious Affairs in 2016 is one such initiative that has been put into practice. The research method is a literature study that shows that Indonesia is a multicultural country with a diversity of ethnicities, cultures, and religions. Therefore, it is likely that this diversity will lead to conflicts between various tribes, cultures, and even religions. The results of this study show that an effective approach in fostering inter-religious harmony is to mainstream religious moderation. Religious moderation education policy aims to prevent intolerance, religious fanaticism, and extremism that threaten social stability and national security, as well as encourage harmony between religious communities in Indonesia. Strengthening religious moderation education in learning is effective, using various evaluation techniques, such as group discussions, questionnaires or surveys, assessments and exams, and direct observation. Religious moderation education can help learners understand the place of religion in their lives.

Keywords: religious moderation, universities, strengthening education

PENDAHULUAN

Dampak dari keberagaman pendapat, cara pandang, keyakinan, dan kepentingan ideologi masyarakat merupakan akibat dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia

(Amir & Nugraha, 2023). Berbagai upaya dilakukan untuk memprediksi perpecahan keragaman yang diakibatkannya. Salah satunya adalah adanya bahasa yang

digunakan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Namun, kesalahan dalam menangani keberagaman terkadang dapat menimbulkan masalah. Konsekuensi dari perbedaan pandangan, keyakinan, dan keyakinan masing-masing anggota masyarakat berasal dari keberagaman masyarakat Indonesia (Nugraha, Derry, Joko, 2023). Banyak upaya dilakukan untuk mencegah masalah dari keragaman yang muncul. Salah satunya adalah individu yang berbeda agama dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain karena bahasa Indonesia adalah bahasa umum yang digunakan. Di sisi lain, permasalahan juga bisa muncul akibat kesalahan penanganan keberagaman (Faridah et al., 2023).

Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang mengadvokasi terselenggaranya pendidikan Islam yang moderat dan inklusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak beragama dan sipil dalam program dan layanan publik yang inklusif. Kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang beragam dinilai paling baik ditata dengan moderasi beragama. Tahun 2019 telah ditetapkan sebagai "Tahun Moderasi Beragama" oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tema utama dalam berbagai inisiatif dan kebijakan yang dibuat adalah moderasi beragama. Lembaga ini senantiasa berupaya menampilkan dirinya sebagai entitas yang memediasi atau menjadi perantara dalam berbagai tekanan keberagaman dan disrupsi kontemporer yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan beragama dan berbangsa (Abror, 2020).

Ide moderasi beragama adalah untuk menjaga kerukunan beragama. Ide ini bertujuan untuk menyesuaikan cara memahami dan melaksanakan ajaran agama dalam konteks masyarakat multikultural, selain menjalankan agama. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengklaim inisiatif moderasi beragama

dilakukan oleh Kementerian Agama RI sebagai salah satu cara berbangsa dan bernegara dalam mengatasi permasalahan radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia. Upaya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam moderasi beragama sangat membantu individu, masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional dan negara dalam memperoleh pemahaman dan pengalaman bersikap moderat (Akhmadi, 2019)

Inilah sebabnya mengapa moderasi beragama sangat penting dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini menetapkan arah kebijakan negara yang jelas untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia menjadi individu moderat yang mengutamakan kepentingan publik dan menjunjung tinggi komitmen nasional, dengan tetap dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai agama.

Untuk mewujudkan tujuan Indonesia maju, salah satu tugas strategisnya adalah membangun toleransi beragama. Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan landasan hukum untuk memperkuat moderasi beragama dengan menguraikan tugas negara untuk melindungi hak setiap warga negara untuk secara bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat perlindungan terhadap kebebasan beragama. Kementerian Agama secara khusus bertugas menjunjung tinggi komitmen negara dalam membela kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mempercayakan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan urusan agama atas nama pemerintahan negara dalam rangka mendukung presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Alim & Munib, 2021).

Moderasi beragama disebut program yang diutamakan baik di lembaga pendidikan tinggi maupun di masyarakat. Penguatan sistem pendidikan tinggi dalam perspektif moderasi beragama yang meliputi pengembangan kurikulum, materi dan proses

pengajaran, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, serta rekrutmen tenaga pengajar merupakan salah satu dari lima strategi utama penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, pemangku kepentingan atau jajaran Kementerian Agama mempelajari kurikulum atau bahan ajar terkait moderasi beragama di lembaga pendidikan agama, perguruan tinggi negeri, dan lembaga pendidikan agama guna memperkuat program-program tersebut (Fahri, mohammad, 2022).

Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa lembaga pendidikan merupakan alat yang berguna untuk mewujudkan perubahan sosial. Oleh karena itu, fokus utama perlu

diberikan pada peningkatan moderasi beragama dalam kurikulum (Nugraha, Derry, Joko, 2023).

Istilah “kebijakan pendidikan moderasi beragama” mengacu pada inisiatif untuk memajukan pengajaran yang menghargai perbedaan keyakinan agama dan menumbuhkan sikap toleransi dan menghormati satu sama lain di kalangan peserta didik dan masyarakat luas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul dari perbedaan agama dan kepercayaan sekaligus mendorong persatuan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan moderasi beragama di Indonesia pada perguruan tinggi secara lebih rinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan data dari sumber tekstual, termasuk buku, jurnal, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dipertimbangkan (Amelia et al., 2023).

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dipublikasikan setelah dilakukan survei terhadap referensi-referensi terkait dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan peraturan pemerintah terkait pendidikan moderasi beragama. Metodologi pengumpulan data

menggunakan pendekatan kepustakaan, khususnya teknik pengumpulan buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan 14 Januari 2023 sampai 23 Februari 2023.

Tiga metode digunakan untuk memproses data yang dikumpulkan untuk penelitian ini: mengedit, menyusun, dan menentukan temuan penelitian. Selanjutnya, analisis isi digunakan untuk analisis data. Analisis jenis ini dilakukan dengan mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasi (Amelia et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara.

Akhir-akhir ini para intelektual Muslim semakin banyak berbicara tentang moderasi Islam. Moderasi beragama merupakan kajian yang menarik untuk dibicarakan, khususnya di Indonesia. Meningkatnya aktivitas kekerasan, teroris, dan anarkis yang dilakukan atas nama Islam oleh kelompok radikal ekstrem telah memicu tren moderasi Islam (Faisal, 2020).

Sejumlah penelitian juga mencatat adanya korelasi antara kejadian radikal-ekstremis dan terorisme serta berkembangnya wacana tentang moderasi beragama. Masih ada penelitian lain yang menemukan hubungan antara kelompok Jihadi Salafi ekstrem dan

serentetan serangan teror di negara.

Pentingnya penerapan moderasi beragama tidak lepas dari keberagaman negara ini. Negara ini memerlukan moderasi beragama karena tiga alasan utama (Hasan, 2021). Pertama, agama ada untuk melestarikan cita-cita manusia melalui peningkatan keamanan dan keharmonisan. Kedua, konflik agama timbul dan harus dicegah melalui fanatisme kelompok akibat penafsiran teks-teks agama. Ketiga, moderasi dalam beragama dianggap sebagai salah satu teknik memajukan peradaban, khususnya di Indonesia. Penjelasan kedua hal tersebut dapat diringkas sebagai berikut: sama-sama menyebut agama sebagai pandangan hidup yang berlandaskan pemahaman keagamaan. Penafsiran teks

agama merupakan sumber utama pemahaman agama. Oleh karena itu, tujuan moderasi beragama dalam bidang ini adalah untuk melemahkan pandangan-pandangan tekstualis radikal. Moderasi beragama sangat penting bagi Indonesia karena alasan-alasan tersebut di atas dan juga karena keberagaman negara ini. Berbagai penelitian terdahulu menyatakan bahwa gagasan Islam wasathiyah merupakan langkah awal menuju moderasi beragama. Pemahaman ini menjelaskan jalan tengah Islam, dengan menunjukkan bahwa Islam berfungsi sebagai mediator atau kekuatan penyeimbang. Keadilan (al 'adl) dan keseimbangan (tawazun) sangat penting dalam situasi ini agar umat Islam tidak terjebak pada salah satu dari dua ekstrem kiri atau kanan, fundamentalis atau liberal. Adapun organisasi Islam yang mengedepankan nilai-nilai tawasuth, tawazun, dan tasamuh (toleran) dalam rangka menjunjung tinggi gagasan moderasi merupakan organisasi yang diperlukan saat ini di Indonesia (Hefni, 2020).

Keseimbangan pandangan yang dianut oleh masyarakat dan kelompok agama diperlukan untuk moderasi beragama. Prinsip inti Islam adalah moderat karena ajaran Islam juga moderat dalam hal ini. Setiap sudut pandang, keyakinan, cara berpikir, dan ikatan antar pribadi harus melakukan hal ini. Moderasi beragama mengharuskan individu beragama bersikap inklusif (terbuka), mampu berbaur, beradaptasi dengan budaya lain, menghargai perbedaan, serta mampu belajar dan saling melengkapi (Habibie et al., 2021). Oleh karena itu, setiap umat beragama dapat terinspirasi dari moderasi beragama untuk menahan diri agar tidak mengambil pandangan yang kasar dan berlebihan ketika berinteraksi dengan keberagaman. Hal ini mencakup perbedaan dalam cara penafsiran teks-teks keagamaan, cara pemahaman gagasan-gagasan keagamaan, cara orang mempercayainya, dan sebagainya. Namun komunitas agama juga perlu mengambil sikap yang adil dan tidak memihak, karena pada akhirnya semua orang harus bisa hidup berdampingan secara damai (Junaedi, 2019).

Islam sendiri tidak hanya mempertimbangkan moderasi beragama dalam hal pendidikan dan hubungannya dengan tradisi agama. Semua agama, tidak hanya Islam, mendukung sikap moderat. Islam tidak hanya mendapat ancaman dari ekstremisme dan fanatisme, tapi juga dari agama lain (Luqmanul Hakim Habibie et al.,

2021). Di Indonesia, setiap agama yang dianut bangsa ini menyesuaikan diri dengan budaya nasional yang berlaku. Penafsiran ajaran agama yang terdapat pada kitab suci masing-masing agama merupakan permasalahan umum yang terjadi pada semua agama.

Dengan demikian, dinamika yang dimaksudkan adalah agar ideologi masing-masing agama dikontekstualisasikan sebelum tertanam secara mendalam dalam budaya multikultural Indonesia.

Seluruh umat beragama di Indonesia harus memiliki rasa komitmen nasional yang kuat sebagai wujud moderasi beragama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seseorang atau sekelompok umat beragama menganut pandangan dan gagasan ideologi nasional, yang utama adalah pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya adalah bagaimana komunitas beragama dapat mempraktikkan toleransi secara efektif. Individu yang beragama harus menghormati ruang pemahaman orang lain dan tidak mencampuri praktik agamanya. Mereka juga secara aktif berkontribusi dalam melestarikan keragaman dan menerimanya, yang merupakan aspek lain dari toleransi yang sangat dibutuhkan negara ini (Nurdin, 2021).

Umat beragama akan bersatu dalam tujuan yang sama yaitu menolak radikalisme dan segala bentuk kekerasan jika mereka mengadopsi pola pikir toleran ini. Pentingnya komunitas beragama untuk beradaptasi dengan budaya lokal juga sama pentingnya. Selain hadir dan muncul dalam kekosongan budaya, agama pun ikut melebur dengannya. Pemerintah Indonesia tengah menerapkan salah satu cara yang diciptakan Kementerian Agama, yaitu pelebagaan moderasi beragama, guna mewujudkan arah moderasi beragama. Dalam hal ini melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Jelas bahwa manajemen strategi implementasi akan diperlukan ketika moderasi beragama dilembagakan, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan moderasi (Prakosa, 2022).

Pondok pesantren yang menjadi tumpuan pendidikan tradisional Indonesia pada hakekatnya mewakili paham pendidikan wasathiyah. Mengajarkan kitab kuning dan menumbuhkan pola pikir yang masuk akal di masyarakat merupakan dua aspek tanggung jawab keilmuan. Di sinilah muncul titik singgung jika dilihat dari beberapa sudut pandang. Pesantren dipandang sebagai

lembaga pendidikan ortodoks. Mereka sebagai kaum tradisional berpegang teguh pada teks dan ajaran agama yang kaku, namun mereka juga terbuka terhadap kemungkinan bahwa dalam hal ini, penafsiran mereka terhadap teks pada akhirnya akan membawa mereka ke arah moderasi. Perguruan tinggi kini mereplikasi paradigma pesantren ortodoks dalam rangka menerapkan moderasi beragama. Namun, secara umum, pendidikan tinggi menawarkan pengetahuan mendasar yang lebih baik dalam sains untuk mempelajari segala jenis dan bidang penelitian (Purbajati, 2020).

Pembahasan

Regulasi Moderasi Beragama

Kementerian Agama Republik Indonesia yang dulu bernama Departemen Agama memiliki sejarah panjang sejak tiga setengah abad ketika Jepang menjajah Indonesia (1942–1945). Pada tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama didirikan atas perintah partai politik Islam. Jepang mendirikan Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), sebuah lembaga urusan agama yang dulu dikenal dengan nama "Shumubu", untuk menjadi forum ambisi keagamaan umat Islam di Indonesia (Saputera & H. Djauhari, 2021). Untuk memberikan informasi yang signifikan tentang kebebasan beragama, Kementerian Agama menerapkan pembatasan kebebasan beragama tertentu dengan mendefinisikan apa itu agama. Dengan demikian, definisi "agama" berbeda-beda menurut berbagai sistem kepercayaan dan perspektif etnis.

Terdapat tujuh program wajib yang disusun pada Rakernas Kementerian Agama Tahun 2021 - 2022 yaitu (Sutrisno, 2019) Pertama, Penguatan Moderasi Beragama (yang dilaksanakan secara internal oleh Kementerian Agama dan masyarakat). Kedua, transformasi digital (untuk kinerja aparatur dan pelayanan publik). Ketiga, kebangkitan KUA sebagai jendela ibadah di berbagai bidang kehidupan; Keempat, Cyber Islamic University (yang memberikan pemerataan akses terhadap pendidikan); Kelima, independensi pesantren (lembaga-lembaga ini membutuhkan dukungan finansial yang stabil untuk menjalankan misinya dalam mengajar, menyebarkan dakwah, dan mendorong pengembangan masyarakat); Keenam, adalah Indeks Agama yang mengukur standar kualitas Ukhawah, Wathoniyah, dan Basyariah Islam di Indonesia; Ketujuh, adalah Pencanangan Tahun Toleransi 2022. Program pertama dari tujuh program yang diselesaikan

pada Rakernas Kemenag 2021 dan Rakernas 2022 adalah penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu, mendorong moderasi beragama sangatlah penting dan menjadi landasan dalam menciptakan hubungan sosial yang bersahabat dalam budaya Indonesia (Ahmad et al., 2022).

Persyaratan suksesnya program untuk moderasi beragama memerlukan pertimbangan yang cermat. Sebab akan menghasilkan disparitas dan kegajilan antar berbagai suku, kepercayaan, pola pikir, sikap, dan perilaku yang membentuk kehidupan sosial negara ini, jika disebarkan dan disosialisasikan tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, penting untuk mengawasi dan menilai bagaimana moderasi beragama diterapkan. Telah dicapai konsensus untuk meningkatkan moderasi beragama, yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan sistem kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai, toleran, dan harmonis. Mengingat masyarakat Indonesia yang multikultural dan beragamnya agama, etnis, budaya, dan kepercayaan, moderasi beragama perlu diperkuat. Pada dasarnya, penciptaan interpretasi yang beragam diperlukan untuk pluralisme agama. Umat beragama dan pemerintah bisa saja mengalami konflik akibat beragamnya penafsiran agama yang sulit dipahami, jika tidak dikendalikan dengan baik (Ali, 2019).

Di Indonesia, sangat penting bagi individu atau kelompok masyarakat untuk memiliki komitmen terhadap negara. Seseorang atau sekelompok orang yang membuat komitmen ini siap untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingannya sendiri. Cita-cita dan prinsip dasar bangsa seperti keberagaman, persatuan, demokrasi, keutamaan hukum, dan kesejahteraan sosial mencerminkan hal tersebut (AR, 2020). Pengabdian bangsa dan negara Indonesia ditunjukkan melalui sejumlah inisiatif, antara lain pendidikan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Pancasila merupakan landasan kebudayaan Indonesia dan menjadi pedoman kebijakan dan tindakan pemerintah. Landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh UUD 1945. Bhinneka Tunggal Ika memberikan ilmu tentang keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Pendidikan, di sisi lain, merupakan alat yang penting untuk menumbuhkan komitmen negara dan nasional karena pendidikan menanamkan pada generasi berikutnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan nilai-nilai nasional (Islamy, 2022)

Menteri Agama Indonesia memulai kampanye moderasi beragama pada tahun 2016. Kurikulum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ditimbulkan oleh keberagaman kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat tercipta kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran. Untuk menjaga keutuhan NKRI, era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini harus dijadikan sebagai wadah pembelajaran yang bermanfaat bagi generasi mendatang dengan menyuguhkan konten keagamaan yang menenangkan dan mendamaikan (Jamaluddin, 2022) Untuk itu, Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Agama RI bekerja sama mendirikan gateway website resmi Perpustakaan Keagamaan.

Pembuatan situs web ini dimaksudkan sebagai sumber daya untuk mengatasi masalah informasi dan teknologi yang berdampak pada pendidik, peserta didik. Fokus pemerintah pada moderasi beragama patut mendapat perhatian, terutama mengingat perannya dalam menyusun narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif mendorong moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia. Lembaga pendidikan mulai dari universitas hingga madrasah dan pesantren ikut terlibat. Peningkatan kualitas kemanusiaan, seperti kerukunan dan moderasi beragama, dapat dicapai melalui berbagai lembaga informal (Nugraha, 2023a).

Literasi agama dan pendidikan antaragama semakin berkembang (interfaith education). Untuk menumbuhkan solidaritas antar umat beragama, lembaga pendidikan harus memperluas praktik berbagai pengalaman keagamaan. Pendidikan antar budaya kini diajarkan sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di tingkat perguruan tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan antar budaya kepada semua peserta didiknya. Selain itu, sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 3663, perguruan tinggi diarahkan membuat

Rumah Moderasi Beragama dalam melembagakan moderasi beragama di perguruan tinggi (Lessy & Widiawati, 2022) Negara memosisikan diri "In Between" dalam pandangan moderasi beragama berdasarkan kebijakan yang telah digariskan sebelumnya. Artinya, mencampuri urusan agama secara berlebihan tidak dapat diterima, namun menjauhkan diri dari agama juga tidak dapat diterima. Negara tidak akan mengabaikan agama; sebaliknya, mereka akan membangun konstitusinya berdasarkan prinsip-prinsip inti agama, menjadikan realisasi kebaikan bersama yaitu kebahagiaan dan perdamaian sebagai salah satu tujuannya.

Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama

Indonesia sebagai negara yang kokoh dengan berbagai pilar dan komponen pendukung yang kuat. Oleh karena itu, meningkatkan moderasi beragama merupakan kewajiban bersama jika berkaitan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya tidak dapat dicapai dengan sendirinya; sebaliknya, hal ini sangat bergantung pada hubungan yang komprehensif dan saling menguntungkan antara berbagai institusi politik dan agama (Nurlaila & Halimatussahkdiah, 2023).

Jika moderasi beragama hanya dilakukan oleh segelintir orang atau organisasi, maka hal tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yakni membina kerukunan. Beragam elemen yang saling berhubungan mempengaruhi moderasi beragama. Elemen-elemen ini berinteraksi dan mempunyai pengaruh untuk membangun suatu sistem secara keseluruhan.

Gagasan bahwa pendidikan adalah sistem yang kompleks dan saling berhubungan, seperti ekosistem alami, dikenal sebagai "ekosistem pendidikan moderasi beragama". Mirip dengan ekosistem alam, manajemen pendidikan terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung. Peserta didik, pendidik, kurikulum, strategi pengajaran, lingkungan belajar, peraturan pendidikan, lembaga pendidikan, dan masyarakat semuanya merupakan komponen manajemen pendidikan. Ketidakseimbangan pada salah satu komponen ini mungkin berdampak pada kinerja dan keseimbangan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, gagasan tentang manajemen pendidikan menyoroti betapa pentingnya semua komponen sistem pendidikan untuk bekerja

sama. Metode ini menekankan pembelajaran dari manajemen pendidikan dengan tetap mengakui kebutuhan dan kemampuan unik setiap orang (Rahayu, 2020).

Lingkungan dimana keberagaman agama dan kepercayaan dapat diakui dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau bangsa, bebas dari prasangka atau konflik yang merugikan pihak-pihak yang berbeda keyakinan, dikenal dengan istilah ekologi pendidikan moderasi beragama (Ruswandi, 2022).

Untuk menciptakan suasana yang mendukung kegiatan keagamaan yang damai dan harmonis, berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kelompok agama, dan masyarakat luas, bekerja sama untuk membangun ekosistem moderasi beragama. Ekologi pendidikan moderasi beragama diartikan sebagai suatu lingkungan yang bebas dari prasangka atau konflik yang merugikan pihak-pihak yang berbeda keyakinan dan dimana keberagaman agama dan keyakinan dapat diakui dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat atau bangsa. Pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat berkolaborasi membangun ekosistem moderasi beragama yang bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan yang damai dan harmonis.

Agar setiap orang memiliki hak yang sama untuk menganut agama apa pun atau tidak beragama sama sekali, serta adanya pemahaman bersama bahwa akses terhadap akomodasi publik, pekerjaan, dan pendidikan tidak boleh terpengaruh oleh diskriminasi, maka terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan (Ruswandi, 2022); Pertama, keadilan dan kesetaraan harus terlebih dahulu dipertahankan oleh pemerintah, negara dan masyarakat. Kedua, landasan untuk mengembangkan lingkungan moderasi beragama adalah toleransi, baik dalam komunitas beragama maupun antar keyakinan. Semua pihak yang terlibat harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada dan tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka yang memiliki pendapat berbeda. Ketiga, menyelesaikan perselisihan dan menghindari konfrontasi yang merugikan kedua belah pihak sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antar komunitas agama. Keempat, pendidikan inklusif dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan sosial. Hasilnya, suasana

yang lebih ramah dan mendukung kelangsungan hidup beragam populasi dapat tercipta.

Kelima, diperlukannya kepemimpinan yang moderat di sejumlah bidang, termasuk politik, pekerjaan sosial, agama, dan ekonomi. Untuk memimpin dengan memberi contoh, para pemimpin harus mengedepankan kesetaraan dan toleransi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Keenam, dengan mendorong kolaborasi dalam berbagai upaya, kerja sama antar lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintah dapat mendukung pengembangan ekosistem moderasi beragama.

Semua inisiatif ini dimaksudkan untuk menumbuhkan ekosistem moderat beragama yang akan mendukung keberadaan masyarakat yang beragam di mana semua umat beragama dapat hidup berdampingan secara harmonis. Karena kehidupan masyarakat dipenuhi dengan beragamnya agama dan kepercayaan, maka diperlukan ekosistem moderasi beragama. Perbedaan pandangan agama berpotensi memicu konflik, ketegangan, dan pertumpahan darah di masyarakat jika tidak ada lingkungan yang mendukung moderasi beragama (Surabaya, 2021).

Dibutuhkan ekologi moderasi beragama untuk menyeimbangkan keberagaman agama dan kepercayaan yang ditemui masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada iklim yang mendorong moderasi beragama, perbedaan keyakinan beragama berpotensi memicu konflik, ketegangan, dan kekerasan di masyarakat. Kaitannya dengan ekologi moderasi beragama, toleransi, komunikasi, pendidikan, perilaku kooperatif, dan kepemimpinan moderat merupakan komponen penting yang mendukung pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap keberagaman agama serta berfungsi untuk menghindari perselisihan di dalam dan antar umat beragama. Dalam hal ini, ekosistem moderasi beragama akan mendukung masyarakat dalam menumbuhkan keadilan dan perdamaian bagi semua, serta persatuan dalam keberagaman.

Penguatan Moderasi Beragama dalam Ruang Lingkup Pendidikan

Menurut RPJMN 2020–2024, tujuan suatu negara dalam kerangka inisiatif strategis untuk memperkuat kerukunan umat beragama dan menumbuhkan keharmonisan sosial antar masyarakat adalah dengan memainkan peran penting dalam moderasi beragama (Faozan,

2020). Satu kementerian tidak bisa secara efektif mendorong moderasi beragama sendirian; melainkan harus berkolaborasi dengan kementerian atau organisasi lain untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Oleh karena itu, Kementerian Agama menjadi sektor utama yang bertugas melaksanakan peningkatan moderasi beragama sesuai amanat RPJMN 2020–2024. Seluruh pemangku kepentingan di kementerian atau lembaga lainnya harus dilibatkan dalam implementasi peningkatan moderasi beragama dalam kehidupan beragama. Hal ini untuk menjamin program pelayanan publik yang inklusif menjunjung tinggi hak-hak sipil dan agama.

Institusi pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam keberhasilan upaya moderasi beragama (Adib et al., 2019). Selain mengajarkan makna agama yang damai, perguruan tinggi juga memupuk nilai-nilai antar budaya dan pengembangan pemikiran kebangsaan. Institusi pendidikan tinggi berperan sebagai platform untuk memperkenalkan peserta didik dan pendidik untuk mendiskusikan berbagai perbedaan yang dapat diterima dan memperluas kepekaan mereka terhadap perbedaan tersebut. Pendidik menjelaskan agama dengan cara yang mengedepankan perdamaian dan bukan permusuhan, dan lembaga pendidikan harus menerima perbedaan-perbedaan ini (Juliati et al., 2018).

Tujuan pendidikan moderasi beragama adalah mewujudkan masyarakat yang dapat hidup dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, namun tetap bersikap toleran, menghargai keberagaman, serta mampu menjaga ketentraman dan ketertiban. Dengan mengajarkan moderasi beragama, perselisihan akibat disparitas agama dan kepercayaan diyakini dapat terselesaikan, sehingga tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan harmonis. Dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pendidikan moderasi beragama dapat ditawarkan dalam berbagai lingkungan pendidikan formal dan informal (Nugraha, 2023b).

Pemahaman moderasi beragama, keberagaman agama dan kepercayaan, etika beragama, dan praktik interaksi antaragama biasanya tercakup dalam kurikulum pendidikan moderasi beragama. Pendidikan moderasi beragama dapat diberikan dalam berbagai konteks pendidikan resmi dan informal, mulai dari lembaga pendidikan dasar

hingga pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan moderasi beragama biasanya mencakup konsep pemahaman moderasi beragama, keberagaman agama dan kepercayaan, etika beragama, dan praktik kontak antaragama.

Untuk menjamin pelaksanaan yang efisien dan terkoordinasi dengan baik, pemerintah dan lembaga terkait lainnya juga harus mendorong pendidikan moderasi beragama (Syahlan & Nugraha, 2023). Selain itu, pengajaran moderasi beragama perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan masyarakat dan kompleksitas dinamika dunia. Oleh karena itu, diyakini bahwa pendidikan moderasi beragama akan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan damai. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pendidikan membantu dalam menanamkan prinsip-prinsip yang mendukung kolaborasi individu dan saling pengertian serta kesadaran keberagaman dan pentingnya menghormati perbedaan.

Peserta didik akan belajar bagaimana menghormati dan menghargai perbedaan agama dan filosofi serta bagaimana memahaminya secara objektif di kelas. Hal ini mendorong anak-anak untuk memandang perbedaan sebagai kekayaan yang perlu dijaga dan dihargai serta mengajarkan mereka bahwa semua agama dan kepercayaan memiliki nilai-nilai yang sama pentingnya dan patut dihormati (Nugraha et al., 2018). Selain itu, lingkungan pendidikan akan menjamin bahwa peserta didik menerima keberagaman dan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dan keyakinan agama. Lingkungan belajar yang ramah dan inklusif dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi seluruh warga dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih toleran dan damai.

Berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan konteks di mana pendidikan diberikan dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan yang dimoderasi. Menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi orang-orang dari berbagai latar belakang, memaparkan prinsip-prinsip dan keyakinan agama secara objektif, membantu peserta didik dalam memahami keragaman agama, mendorong komunikasi dan diskusi yang jujur, dan memperkenalkan ritual keagamaan yang inklusif adalah beberapa pendekatan yang populer untuk mencapai hal ini. Penting juga untuk mempertimbangkan kurikulum dan strategi pengajaran yang

berpegang pada cita-cita moderasi beragama (Hamdi, 2021).

Untuk menjamin efektivitas dan integrasi di banyak bidang pendidikan, pemerintah dan lembaga terkait harus mendukung pelaksanaan pendidikan yang diatur. Membangun suasana pembelajaran yang ramah, menerima, dan menghormati yang menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan menerapkan pendidikan moderat secara efektif. Peserta didik yang melakukan hal ini mungkin akan tumbuh menjadi orang yang lebih menerima, toleran, dan menghargai keberagaman di dunia yang semakin heterogen (Nasir, 2022).

Ada banyak pendekatan untuk memperkenalkan praktik pendidikan moderasi di lembaga pendidikan. Hal ini melibatkan penggabungan pendidikan moderasi berbasis kurikulum. Ketika mengajarkan materi agama, lembaga pendidikan mungkin sangat menekankan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan dapat mendirikan komunitas-komunitas yang didedikasikan untuk moderasi, yang bertujuan untuk mempraktikkan moderasi, studi tentang moderasi, dan menyelenggarakan acara-acara yang dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi beragama. Selain itu, lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan acara seperti konferensi, diskusi, dan pertemuan komunitas agama yang berbeda untuk meningkatkan toleransi dan mendidik peserta didik tentang nilai kerja sama antaragama.

Komunitas kerukunan antar umat beragama dibentuk oleh lembaga pendidikan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pendidikan moderasi. Tugas mereka antara lain memantau kegiatan-kegiatan di dalam lembaga-lembaga tersebut, memediasi perselisihan antar umat beragama, dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif yang mendorong toleransi dan keharmonisan bersama. Peserta didik dapat memahami dan menyerap nilai-nilai yang terdapat dalam moderasi beragama dengan mempraktikkan tahapan-tahapan pendidikan moderasi. Hal ini

akan membantu mereka tumbuh menjadi orang yang toleran, menghargai perbedaan orang lain, dan mampu hidup berdampingan secara damai (Prakosa, 2022).

Ada beberapa pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan moderasi beragama, antara lain focus group, angket atau survei, asesmen dan ujian, serta observasi langsung. Guru dan dosen mengawasi peserta didik dengan cermat sepanjang kelas atau kegiatan ekstrakurikuler untuk melihat apakah mereka menunjukkan toleransi, menghormati keberagaman, dan keharmonisan antar umat beragama. Ujian tertulis atau tugas-tugas terkait yang meliputi pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai moderasi, sikap mereka terhadap toleransi, dan langkah-langkah spesifik yang mereka ambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan sebagai tes dan penilaian yang dikaitkan dengan topik pembelajaran moderasi beragama (Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, 2021).

Dengan menanyakan pemahaman peserta didik tentang idealisme moderasi, sikap mereka terhadap toleransi, dan pengalaman mereka menghadapi situasi yang memerlukan sikap moderasi, kuesioner dan survei dapat digunakan untuk menilai seberapa baik peserta didik memandang pengajaran moderasi beragama (Harahap, 2011). Melalui berbagi pengalaman dan menawarkan nasihat satu sama lain, percakapan kelompok dapat dimanfaatkan untuk menilai kapasitas peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam situasi dunia nyata. Saat melakukan penilaian, penting untuk mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk efisiensi strategi pengajaran yang digunakan, kedalaman pemahaman peserta didik, dan kapasitas mereka untuk menerapkan standar moderasi. Institusi pendidikan dapat meningkatkan standar pengajaran moderasi beragama dan menghasilkan generasi yang lebih menerima dan toleran dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

PENUTUP

Salah satu bidang yang terkena dampak signifikan dari strategi moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama Republik Indonesia adalah pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

Baik di lembaga pendidikan formal maupun informal, kebijakan moderasi beragama dapat ditegakkan melalui proses pembelajaran. Mahasiswa didik dapat mempelajari nilai

toleransi, menghargai keberagaman, dan kerukunan antar umat beragama melalui adanya kebijakan yang menerapkan moderasi beragama. Untuk menjamin pembelajaran efektif, berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, seperti diskusi kelompok, angket atau survei, penilaian dan

ujian, serta observasi langsung. Oleh karena itu, kebijakan moderasi beragama merupakan langkah penting dalam mengembangkan komunitas lembaga pendidikan yang ramah dan menerima. kata misal *pertama*, *kedua*, dan seterusnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi : Kajian Islam dan Keberagaman. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137-148.
- Ahmad, R., Stai, S., & Email, C. (2022). *Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama islam*. 20(1), 1-12.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Ali, N. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman*, 14(September 2019), 82-102.
- Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 9(2), 263. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719>
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Amir, M., & Nugraha, D. (2023). Peningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Akibat Efek Penggunaan Model Pembelajaran Flipped Classroom Dan Mind Mapping. *JIPMuktj: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 4(2), 69. <https://jurnal.pcmkramatjati.or.id/index.php/JIPMUKJT/index>
- AR, S. (2020). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama. *Al-Irfan*, 3, 37-51.
- Fahri, mohammad, A. zainuri. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad. *Religions*, 13(5), 451. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>
- Faisal, M. (2020). Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di Era Digital. *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development*, 195-202.
- Faozan, A. (2020). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultural. *Hikmah : Journal of Islamic Studies*, 16(2), 219-228.
- Faridah, E. S., Febrianti, R., Purnomo;, Hajar, M., Dahlan, M. Z., Gaol, E. L., Maqbuloh, A., Nugraha, D., Nurjanah;, Laelasari, E., Sayekti, S. P., & Wijaya, S. (2023). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21* (1st ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Hamdi, S. (2021). *Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial : Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi*. 27(1), 1-15.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muhtadiin*, 7(2), 111-123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadii>
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Islamy, A. (2022). *Moderasi beragama dalam ideologi pancasila*. 3, 18-30. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v3i1.333>
- Jamaluddin. (2022). IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MULTIKULTURALITAS INDONESIA (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama). *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1-13.
- Juliati, J., Firman, M., & Nugraha, D. (2018). Improving Mathematical Communication Capabilities By Realistic Mathematics Approach. (*Jiml*) *Journal of Innovative Mathematics Learning*, 1(3), 338. <https://doi.org/10.22460/jiml.v1i3.p338-344>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182-186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Lessy, Z., & Widiawati, A. (2022). IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR. *Pedagogie*, 3(2), 137-148.
- Luqmanul Hakim Habibie, M., Syakir Al Kautsar, M., Rochmatul Wachidah, N., & Sugeng, A. (2021).

- Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Jurnal Moderasi Beragama*, 01(1), 121–150.
- Nasir, M. K. R. M. (2022). Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa. *PUSAKA : Jurnal Khazanah Keagamaan*, 172–185.
- Nugraha, Derry, Joko, F. S. (2023). PENGARUH KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER/UKM DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA. 4(1), 1–8.
- Nugraha, D. (2023a). Akuntabilitas Pemimpin Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi Dan Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 194–205. <https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JPE/article/view/1375>
- Nugraha, D. (2023b). Pengaruh metode simulasi demonstrasi terhadap hasil belajar mahasiswa. *Jurnal Pena Edukasi*, 10(1), 1–8.
- Nugraha, D., Ginanjar, H., & Rolina, R. (2018). Problem Solving Ability and Problem Based Learning. (*Jiml*) *Journal of Innovative Mathematics Learning*, 1(3), 239. <https://doi.org/10.22460/jiml.v1i3.p239-243>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Nurlaila, & Halimatussahkdiah. (2023). INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA Nurlaila. *Nasional Education Conference Strategies for Developing the Profile of Rahmatan Lil Alamin Students in Madrasah*, 45–53.
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. *Falasifa Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 182–194. <https://media.neliti.com/media/publications/318931-peran-guru-agama-dalam-menanamkan-moderasi>
- Rahayu, L. R. (2020). POTENSI PERAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA. *Jurnal Pustaka*, 7, 31–37.
- Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, M. Y. (2021). Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dalam upaya membentuk sikap moderat siswa madrasah. *AL_WIJDAN : Journal of Islamic Education Studies*, VI(May), 1–14.
- Ruswandi, U. (2022). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5, 3194–3203.
- Saputera, abdur rahman adi, & H. Djauhari, M. S. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama. ... *Moderasi Beragama ...*, 01(1), 41–60. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>
- Surabaya, S. D. N. M. (2021). NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERMENDIKBUD NO . 37 TAHUN 2018 Achmad Zainal Abidin Pada Desember 2016 , Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung bersikap intoleran dan berpaham in. 2(5), 729–736.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Syahlan, F., & Nugraha, D. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Prestasi Belajar Mahasiswa. *Journal of Education and Culture*, 53(9), 1689–1699.